

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana perwakilan memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan. Sistem aturan mayoritas juga bisa diartikan sebagai pemikiran atau pemikiran yang menitikberatkan pada harapan yang setara serta perlakuan yang setara terhadap seluruh warga negara. Inti dari sistem demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tujuan dari sistem pemerintahan mayoritas adalah agar otoritas publik suatu negara dapat menerapkan pengaruh dan kekuatan penduduknya terhadap negaranya. Pemerintahan yang mempunyai andil besar dalam kekuasaan memegang peranan utama dalam penyampaian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya dalam perspektif trias politica), yaitu kekuasaan negara yang diperoleh dari perorangan hendaknya juga dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa publik dan bantuan pemerintah untuk perorangan.

Pemilu sebagai sarana demokrasi telah digunakan beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dalam hal ini masyarakat dapat memilih pemimpin yang diharapkan atau dianggap mampu menjalankan prinsip-prinsip dasar negara yang menganut sistem demokrasi, oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Caesar,

2022). Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 22E perubahan ketiga UUD NKRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan :

- (1). Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
- (2). Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD;
- (3). Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 22E ayat (5) menyatakan;

“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 18 Ayat (4) tersebut hanya mengharuskan yang dipilih secara demokrasi adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota)”.

Terkait pemilu, untuk menjadi negara demokratis diperlukan peran masyarakat yaitu ikut serta dalam pemilu itu sendiri. Bentuk partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan memperluas informasi mengenai mekanisme dan syarat mengikuti pemilu. Pendidikan politik diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih akan hak dan tanggung jawabnya dalam pemilu serta meningkatkan partisipasi pemilih. Pendidikan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui sosialisasi di beberapa tempat, baik yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, maupun lembaga terkait pemilu.

Pendidikan politik merupakan upaya sadar untuk memperluas pemahaman politik individu terhadap kualitas-kualitas yang terkandung dalam kerangka politik ideal yang akan dibangun (Alfian, 1981). Untuk membangun masyarakat yang demokratis dan responsif, pendidikan politik sangatlah penting. Melalui instruksi politik, masyarakat dapat memahami cara kerja pemerintah dan bagaimana pilihan

politik diambil. Selain itu, pendidikan politik juga membantu masyarakat dalam memahami kebebasan dan komitmen warga serta menjadi lebih dinamis dalam dukungan politik. Yang dimaksud dengan “partisipasi politik” adalah proses dimana individu memposisikan dirinya sebagai warga negara (pemilih) dan bukan sebagai politisi yang baru terpilih untuk mengambil keputusan yang jujur dan adil guna meningkatkan stabilitas negara. Sebagai upaya untuk mengubah investasi politik, pentingnya pengambilan keputusan juga penting untuk mengatur rancangan kekuasaan skala penuh agar lebih mudah menjamin berfungsinya sistem check dan keseimbangan antara organisasi-organisasi politik di tingkat fokus. Pelatihan politik dapat dilakukan bagi siapa saja, bahkan bagi penyandang disabilitas sekalipun mempunyai hak dan komitmen untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu keputusan.

Pilihan untuk memberikan suara sebagai bentuk kerja sama politik dikenang sebagai pengumpulan hak-hak bersama dan hak-hak politik. Hal ini menyinggung Perjanjian Kebebasan Bersama dan Politik atau *Worldwide Show on Common and Political Privileges* (ICCPR). Tujuan ICCR adalah menjadikan hak-hak dasar UDHR di bidang sipil dan politik mengikat secara hukum dan menguraikannya dengan poin-poin lain yang relevan. Dengan demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh pedoman ICCR, setiap orang berhak atas hak istimewa politik tanpa memperhatikan identitas, negara dan ras, bahkan individu dengan disabilitas pun berhak atas kebebasan ini. Dalam situasi ini, hak istimewa politik diartikan sebagai komponen kerja sama dalam pemerintahan negara melalui opsi untuk memberikan suara dan dipilih.. Secara implisit, hak politik ini terkategori dalam kelompok

derogable rights, yang dimaknai sebagai suatu hak yang dijamin oleh negara, tetapi dalam kondisi yang sangat darurat dapat dikurangi tanpa diskriminasi. Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena masih terdapat diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas

Di Jakarta Timur sendiri dipilih oleh penyandang disabilitas tahun 2019 sebesar 2.858 rincian nya 504 tunadaksa, 258 Tunanetra, 295 Tunarungu, 1.434 tunagrahita , 458 disabilitas lain nya (Aditya, 2019). Ini merupakan jumlah yang besar dibandingkan dengan pilkada 2017 yang hanya berjumlah 2.766 . Peningkatan jumlah tersebut menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat mulai meningkat bahkan bagi penyandang disabilitas khusus daerah Jakarta Timur. Peran penting KPU dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi agar tercapai dengan baik bisa terjadi asal setiap masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya.

Salah satu tugas yang telah dilakukan KPU Jakarta Timur dalam menerapkan sosialisasi pemilu khususnya dalam pemilu 2024 yaitu melakukan sosialisasi diberbagai tempat seperti sekolah, universitas, komunitas dan lain sebagainya. Salah satu tempat yang dikunjungi KPU Kota Jakarta Timur yaitu di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung. Sosialisasi dari KPU harus diselesaikan agar warga penyandang disabilitas mental ingat bagaimana mereka memanfaatkan hak demokratis mereka dalam mengambil keputusan. Penyandang disabilitas mental mempunyai hak pilih yang sama dengan pemilih lainnya, hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, selama mereka berstatus warga negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun, dan memiliki hak pilih.

-KTP, mereka tidak kehilangan haknya untuk terdaftar sebagai pemilih. KPU Jakarta Timur menyiapkan tiga TPS khusus di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 untuk 1.000 penyandang disabilitas saat ini.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi ini yaitu *Efektivitas Pendidikan Politik Oleh KPU Jakarta Timur Terhadap pemahaman pemilu 2024 oleh penyandang disabilitas panti sosial bina laras Harapan sentosa II*

1.2. Rumusan Masalah

Setelah dengan adanya kerjasama KPU Jakarta Timur dan staff panti sosial bina laras sentosa II pada tanggal 13 Juli 2022 maka diadakan pendidikan politi pemilu 2024 dan uji petik data pemilih. Uji petik adalah salah satu instrumen pemantauan dengan melakukan kunjungan langsung, rutin, terjadwal dan terukur, secara sampling ke kabupaten /kota dan desa/kelurahan. Dalam hal ini uji petik yang dilakukan sasaran layanan adalah warga panti yang tergolong pemilih tetap, langkah awal untuk meningkatkan kembali partisipasi pemilih di Kota Jakarta Timur yang pada Tahun 2019 lalu menempati partisipasi tertinggi menurut data KPU Jakarta Timur maka kegiatan ini di harapkan mampu lebih meningkatkan lagi partisipasi dari pemilu sebelumnya. Proses pengujian dilakukan dengan cara uji NIK warga panti dan pengelola panti. Pada saat itu terdapat sekitar 300 lebih peserta yang ikut dalam sosialisasi tersebut meskipun masih jauh dari jumlah keseluruhan pasien yang ada di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan KPU Jakarta Timur hanya mengundang peserta tidak

mencapai setengah dari jumlah warga binaan yang berjumlah 1000 lebih dikarenakan faktor pengurus PSBL yang harus mengurus binaan lainnya (endraningsih, 2023)

Penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai keterbatasan kemampuan dan kesulitan berinteraksi dengan lingkungannya karena keterbatasan fisik, disabilitas mental, atau disabilitas intelektual. Dalam hal ini, pengertian penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan penjelasan atau pengertian tentang penyandang disabilitas dalam Pasal 1 angka 1 bahwa : (Purnomosidi, 2017)

“Siapa pun yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dapat dianggap sebagai penyandang disabilitas jika mereka mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat bersama warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak. Penyandang Cacat adalah setiap individu yang mengalami hambatan fisik, intelektual, mental, atau mungkin hambatan sentuhan dalam jangka waktu lama yang, dalam kaitannya dengan iklim, mungkin mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan sungguh-sungguh dengan penduduk lain karena kebebasan yang setara.”

Artinya dalam penyandang disabilitas yang dimaksud pada Undang- Undang tersebut adalah manusia atau individu yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, dan tetap harus dihormati dan diakui atas hak asasi manusia yang dimilikinya.

Kerangka hukum ini menjelaskan hambatan dan kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi penuh dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian perlu kerja sama antara pengurus disabilitas dan instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu salah satunya KPU Jakarta Timur

karena pemilih penyandang disabilitas mempunyai peran paling penting dalam pemilihan umum karena merekalah yang berhak mengukur kesuksesan pemilu yang akan datang.

Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 merupakan salah satu panti sosial binaan Bansos DKI Jakarta yang mewajibkan bagi penyandang gangguan jiwa. Sesuai dengan Deklarasi Penggembala Partai Nomor 50/HUK/2004, maka lembaga sosial ini mempunyai tugas untuk memberikan bantuan dan pemulihan sosial bagi penyandang cacat mental, agar mereka dapat bebas dan berperan aktif di arena publik. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II saat ini menampung 1000 pasien yang terdiri dari 600 perempuan dan 400 laki-laki. Pasien di panti jompo dipisahkan menjadi 3 kelompok dengan tanda yang dikenakan pada pakaiannya, seperti hijau untuk pasien ringan, kuning untuk pasien sedang, dan merah untuk pasien ekstrim (Saumi, 2018).

Penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah sosialisasi yang dilakukan KPU Jakarta Timur di Panti Sosial Bina Laras Sentosa II dapat mempengaruhi dan meningkatkan jumlah pemilih dari pemilu sebelumnya. Maka dari itu penulis akan membahas seberapa efektif pendidikan politik/pemilih yang telah dilakukan sebelumnya.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik oleh KPU terhadap penyandang disabilitas di PSBL?
2. Bagaimana pemahaman penyandang disabilitas PSBL tentang pemilu pasca pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Jakarta Timur?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menentukan efektivitas pendidikan politik KPU di Jakarta Timur
2. Untuk mengetahui pemahaman pendidikan politik yang dilakukan KPU Jakarta Timur terhadap warga panti sosial Bina Laras Harapan Sentosa II?

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Signifikansi Akademik

Pendidikan politik sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana proses pendidikan dapat mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang dalam lingkungan politik. Pendidikan politik sendiri merupakan bagian dari mata kuliah Demokrasi dan Demokratisasi yang menjadi dasar dari demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini pendidikan politik memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi dan demokratisasi. Pemerintahan dengan sistem demokrasi adalah pengaturan pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui delegasi yang mereka pilih. Demokratisasi, sekali lagi, mengacu pada siklus di mana masyarakat atau suatu negara bergerak menuju bentuk pemerintahan yang lebih adil atau menjadikan pemerintahan mayoritas sebagai bagian dari kerangka politiknya. Sehingga Pendidikan politik memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada warga negara yang menganut sistem demokrasi mengenai bagaimana sistem politik berfungsi dengan semestinya.

Dengan pengetahuan ini, warga negara dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Pendidikan politik dapat membantu memperkuat lembaga-lembaga demokratis, seperti parlemen, pengadilan, dan

lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dengan menciptakan pemahaman tentang pentingnya independensi dan akuntabilitas lembaga-lembaga tersebut. Dengan meningkatkan pendidikan politik masyarakat, dapat terjadi perubahan yang positif dalam memahami ilmu politik dan pada akhirnya memberikan dampak yang lebih baik pada pembangunan sosial dan politik suatu negara. Dengan adanya pendidikan politik diharapkan pemahaman dasar ilmu politik dapat dimengerti oleh semua kalangan masyarakat sehingga terjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dan para pemegang kekuasaan nantinya.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan syarat akhir untuk menyelesaikan studi strata Ilmu Politik satu di Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia untuk mendapatkan Gelar S.Sos

1.6. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, para peneliti mensurvei skripsi sebelumnya untuk menghindari kesamaan hasil penelitian. Tinjauan literatur juga dilakukan untuk membandingkan penelitian yang telah dilakukan. Eksplorasi masa lalu yang diambil sebagai survei dalam pemeriksaan ini meliputi:

1. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian skripsi yang dilakukan Adi Aqmal mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul skripsi *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019*. Peneliti terdahulu menggunakan dianalisis dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dan dibahas dengan menggunakan Metode

Kualitatif. Teori yang digunakan partisipasi politik dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pemenuhan hak-hak politik Penyandang Disabilitas yang telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meskipun peran dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal (Akmal, 2019).

2. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Taufiq MS mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Sosialisasi Politik Virtual Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018*. Peneliti terdahulu fokus kepada Pemanfaat Media Sosial oleh KPU Kota Surabaya dalam mensosialisasikan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 (MS, 2018) . Kemudian menggunakan 2 teori yaitu teori komunikasi dan sosialisasi. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Maghpirah dari Universitas UIN Antasari Banjarmasin dengan judul *Partisipasi Politik penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*. Peneliti terdahulu menggunakan hukum empiris peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan hukum terhadap keikutsertaannya

dalam pemilu serentak yang didapat dari wawancara. Analisa data secara deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

4. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Maria Desti Rita dari Universitas Lampung dengan judul *Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi pemilihan umum kepada penyandang disabilitas di kota Bandar Lampung*. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek KPU dan penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.
5. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan Putri Rahmawati dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan judul *Implementasi perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dan lansia dalam pemilihan umum 2019 (Studi kasus KPU Kabupaten Cirebon)*. Peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknis analisis deskriptif.

Dari penjelasan penelitian terdahulu diatas yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Perbandingan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Dalam penelitian tentang *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas*

Di Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti. Perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian sedangkan persamaannya terletak pada pendekatan penelitian kualitatif dan teori partisipasi politik.

2. Dalam penelitian skripsi tentang *Sosialisasi Politik Virtual Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018*. Terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yaitu pada lokasi, waktu penelitian dan teori yang digunakan peneliti terdahulu yaitu teori komunikasi dan sosialisasi dan persamaan dengan peneliti saat ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan subjek yang sama yaitu KPU.
3. Dalam penelitian skripsi tentang *Partisipasi Politik penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam beberapa hal yaitu persamaannya adalah peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan wawancara sedangkan perbedaannya adalah subjek yaitu peneliti terdahulu meneliti di kota Banjarmasin sedangkan peneliti sekarang meneliti di PSBL Jakarta Timur.
4. Dalam penelitian skripsi tentang *Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi pemilihan umum kepada penyandang disabilitas di kota Bandar Lampung*.

1.7. Landasan Konseptual

1.7.1 Teori Efektivitas Program

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai dan merujuk pada pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur

sejauh mana suatu program atau kebijakan pemerintah mencapai tujuannya.. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi (Kurniawan, 2018)

Efektifitas program menurut Campbell J.P. (1989:121) dalam Starawaji (2009) Mari kita lihat dari sudut pandang keberhasilan program. Program ini menitikberatkan pada keberhasilan program, yang dibuktikan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan suatu program kerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan, adapun indikator yang berlaku sebagai berikut:

1. **Keberhasilan Program**
Keberhasilan program dapat dilengkapi dengan kemampuan fungsional dalam melaksanakan program kerja sesuai target yang telah ditetapkan. Kemajuan program dapat dinilai dari siklus dan komponen-komponen gerakan yang dilakukan di lapangan dan selanjutnya program dilaksanakan oleh lembaga pelaksana dan berdasarkan hasil penilaian kemajuan program pada bagian pelaksanaannya. keterkaitan proses penyusunan program..
2. **Keberhasilan Sasaran**
Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektifitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepuasan terhadap program, yaitu kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kuliatas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga..
3. **Kepuasan terhadap program**
Pemenuhan merupakan dasar kecukupan yang mengacu pada hasil program dalam memenuhi kebutuhan klien. Klien merasa puas dengan sifat barang atau layanan yang dikirimkan. Semakin baik kualitas produk dan layanan yang diberikan, semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan konsumen, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan
4. **Pencapaian tujuan menyeluruh**
Pencapaian Tujuan adalah pekerjaan umum untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai sebuah siklus. Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya tujuan terakhir diperlukan tahapan-tahapan, baik bekerja dalam arti menyelesaikan bagian-bagiannya maupun secara bertahap

mengurangi dalam arti periodisasi. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa variabel, khususnya; Rentang waktu dan target merupakan target yang substansial.

1.7.2 Konsep Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata mengerti. Memahami diartikan memahami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemahaman adalah kemampuan individu untuk memahami pentingnya materi yang sedang dipertimbangkan, yang dikomunikasikan dengan memahami substansi dasar dari suatu pembacaan atau perubahan informasi yang diperkenalkan dalam struktur tertentu ke struktur lain (Maesaroh, 2016). Apabila pemahaman merupakan suatu persentase kemampuan seseorang dalam memahami atau menangkap latihan yang dilakukan orang tersebut, maka dalam pembelajaran, guru harus memahami atau memahami apa yang diajarkan orang tersebut kepada siswa.

Menurut Anas Sudijono, pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut. Seorang guru dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri (Adiyono, 2022). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman adalah kesanggupan seseorang dalam memahami atau menafsirkan sesuatu. Seseorang dapat dikatakan paham apabila mampu memberikan penjelasan secara rinci mengenai data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan gagasan yang ada. Akan jauh lebih baik jika seseorang memberikan ilustrasi tentang apa yang dia sadari dengan masalah di sekitarnya.

1.7.3 Teori Pendidikan Politik

Teori pendidikan politik adalah studi tentang bagaimana individu belajar, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan politik mereka dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini mengasumsikan bahwa pendidikan politik merupakan proses yang terus-menerus dan kompleks yang terjadi di dalam dan di luar sekolah. Teori pendidikan politik mencakup tiga elemen penting: pengetahuan politik, keterampilan politik, dan nilai politik.

Pengetahuan politik mencakup pemahaman tentang sistem politik, struktur pemerintahan, proses politik, dan isu-isu politik terkini. Keterampilan politik meliputi kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan proses politik, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif tentang isu-isu politik. Nilai politik mencakup keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari pemahaman individu tentang sistem politik dan bagaimana mereka harus berpartisipasi di dalamnya. Teori pendidikan politik juga menekankan pentingnya pendidikan politik untuk mempromosikan kewarganegaraan yang aktif dan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses politik. Pendidikan politik dapat terjadi di sekolah, lembaga pendidikan tinggi, organisasi masyarakat, media massa, dan melalui pengalaman langsung dalam proses politik.

Menurut Paulo Freire, pendidikan politik harus berfokus pada memberdayakan masyarakat dan membangun kesadaran kritis. Freire menganggap bahwa pendidikan politik bukan hanya tentang memasukkan informasi tentang sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga tentang membantu individu memahami kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Freire mengembangkan pendekatan pendidikan kritis yang berpusat pada prinsip-prinsip

pembebasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Menurutnya, Pendidikan politik harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan merancang solusi yang lebih baik terhadap permasalahan sosial dan politik. Freire juga menekankan pentingnya dialog dan refleksi dalam pendidikan politik. Dalam pendekatannya, guru dan siswa harus bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah sosial dan politik, memahami akar permasalahannya, dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Lebih lanjut, Freire percaya bahwa pendidikan politik harus mengembangkan kesadaran kritis pada individu. Hal ini dilakukan dengan membantu individu memahami struktur kekuasaan dan konflik dalam masyarakat, serta bagaimana individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Pendekatan pendidikan kritis Freire memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang masyarakat dan lingkungan politik mereka, serta memberikan kemampuan dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Tujuan utama dari teori pendidikan politik adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik mereka. Dengan meningkatkan pengetahuan politik, keterampilan, dan nilai-nilai politik, individu dapat mempengaruhi kebijakan dan proses politik, serta mengambil peran yang lebih aktif dalam masyarakat mereka.

1.7.4 Pemilu

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota DPRD dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Kesatuan Indonesia Tahun 1945. Pesta demokrasi ini merupakan

puncak dari sistem demokrasi dimana hak setiap orang dihormati dan diakui sebagai kekuatan utama dalam menentukan arah suatu negara. Semuanya dimulai dengan berbagai kandidat atau partai politik yang menyampaikan gagasan, ide, dan janjinya kepada publik. Warga negara mempunyai latar belakang dan latar belakang yang berbeda-beda mendengarkan, mengevaluasi dan memilih kandidat atau partai politik yang dianggap mewakili aspirasi dan kepentingan mereka. KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilu yang berisi ;genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-e, berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga, dant idak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

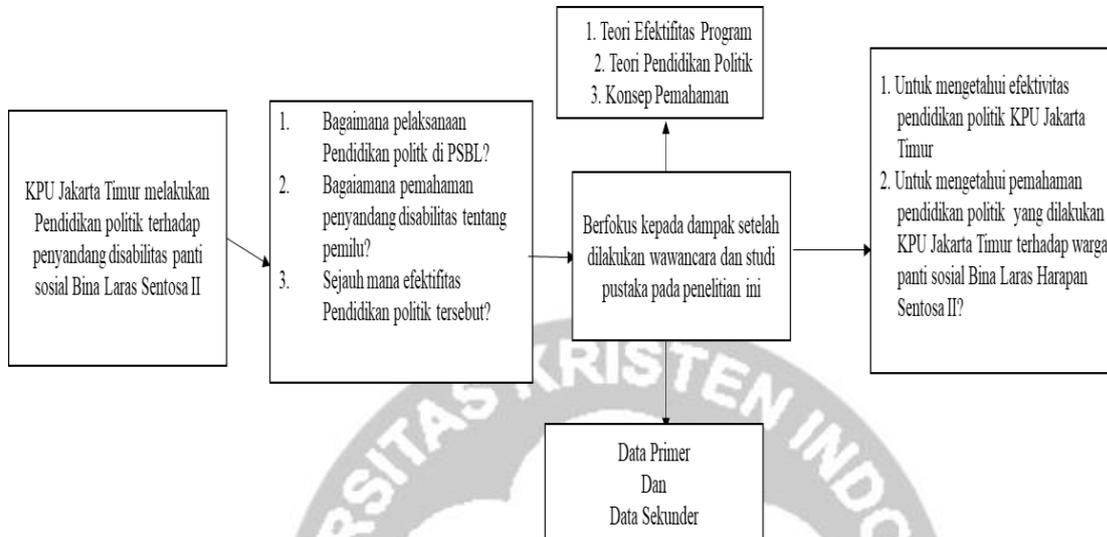
Pada 14 Februari 2024 akan dilakukan pemilu yang akan diikuti masyarakat Indonesia, pemilu kali ini akan dilakukan serentak dengan pelaksanaan Pilkada. Pada 27 November 2024 rencananya pemungutan suara akan dilakukan serentak. Jumlah absolut daerah yang akan merangkap keputusan kepala provinsi pada tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 wilayah, 415 wilayah, dan 93 kelurahan. Masyarakat umum harus dapat memilih sesuai dengan keinginan mereka, suara kecil dan harus dapat melihat seperti apa jaminan misi, sejarah pendatang baru, dan impian yang disampaikan oleh pertandingan pesaing. Pemilu bukan sekadar suatu acara , namun sebuah peristiwa yang mencerminkan semangat demokrasi dan kebebasan. Inilah saatnya kekuatan rakyat dipertahankan dan suara

setiap warga negara mempunyai makna dan pengaruh. Memahami hak untuk memilih, tanggung jawab sipil dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi adalah kunci keberhasilan pemilu dan keberlanjutan sistem demokrasi negara. Ceritanya, pemilu adalah perjalanan kolektif menuju pemerintahan yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat.

1.8. Bagan Alur pemikiran

Alur pemikiran adalah cetak biru alias sketsa yang diprakarsai untuk seorang penulis ketika merancang suatu proses penelitian. Kerangka mental memberikan penjelasan sementara atas gejala yang dimaksud. Kerangka kerja ini dikembangkan berdasarkan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian yang penting atau terkait. Ukuran suatu kerangka berpikir bersifat persuasif adalah proses berpikir yang logis dalam mengkonstruksi pemikiran yang mengarah pada kesimpulan berupa hipotesis. Karena permasalahan yang teridentifikasi berkaitan dengan teori, maka solusi terhadap permasalahan yang teridentifikasi juga dapat ditemukan. Ini ditampilkan untuk membantu menjawab atau menjelaskan masalah yang teridentifikasi. Alur pemikiran merupakan suatu model teoritis yang menunjukkan bagaimana suatu hipotesis dihubungkan dengan berbagai komponen yang telah dibedakan sebagai permasalahan yang signifikan. Alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Gambar 1.1 Alur Pemikiran



KPU Jakarta Timur memiliki tugas salah satunya adalah menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. Dalam mengimplementasi tersebut maka dilakukan kegiatan sosialisasi pendidikan politik yang ada di panti sosial bina laras sentos II. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para penyandang disabilitas di panti sosial bina laras sentos II dapat berpartisipasi dalam pemilu berikutnya. Peneliti ingin mencari tahu pelaksanaan pendidikan politik berupa sosialisasi yang dilakukan KPU Jakarta Timur di PSBL II, bagaimana pemahaman yang dialami para peserta setelah dilakukan sosialisasi tersebut dan seberapa efektifif kegiatan tersebut.

Peneliti menggunakan teori yang sesuai dengan pembahasan judul yaitu dengan teori efektifitas program dan pendidikan politik sebagai landasan utama dalam penelitian ini. Diharapkan dengan teori tersebut dapat menjelaskan tujuan dari penelitian ini dengan tambahan konsep pemahaman didalamnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah wawancara terhadap peserta sosialisasi atau

warga PSBL sendiri sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu dari beberapa jurnal dan buku yang mengenai pendidikan politik dan pemilu. Kedua data ini akan menjadi landasan kuat untuk memperjelas data penelitian ini.

Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah agar mengetahui efektif atau tidaknya kegiatan pendidikan politik di PSBL, dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para warga PSBL tentang pemilu yang akan datang setelah dilakukan sosialisasi. Dan diharapkan hasil yang didapatkan yaitu jumlah pemilih penyandang disabilitas pada tahun 2024 dapat meningkat n angka lebih tinggi dari pada jumlah peserta pemilu penyandang disabilitas tahun 2019 di DKI Jakarta

1.9. Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian Kualitatif

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif (*Qualitative research*). Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan buat menggambarkan dan menganalisa fenomena, peristiwa, Aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok. Metode kualitatif ini dipakai karena beberapa alasan. Miles dan Huberman menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu cara untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami fenomena sosial yang kompleks melalui pemahaman mendalam tentang pengalaman, perilaku, atau pandangan individu (Fadli, 2021). Metode kualitatif lebih mudah beradaptasi dan memiliki banyak realitas, metode ini membuat hakekat peneliti dan responden secara langsung untuk mengatakan bahwa metode ini lebih peka, sehingga dapat menyesuaikan, mengasah dapat saling mempengaruhi pola nilai yang dihadapi peneliti.

Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta berupa tingkat pemahaman sebelum dan sesudah sosialisasi yang dilakukan KPU Jakarta Timur di

Panti Sosial Bina Laras sentosa II sebagaimana berjalan dengan semestinya. Dengan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk menemukan dan memahami serta menjelaskan efektivitas sosialisasi pendidikan politik yang diterima oleh para warga panti sosial bina laras sentosa II. Dengan metode kualitatif dapat memberikan satu hasil penelitian yang rinci yang dimana sulit untuk diungkap bila menggunakan metode penelitian kuantitatif, sebab penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peristiwa secara naturalistik dan detail.

1.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Pola deskriptif eksploratif diperlukan pada penelitian ini. Dengan kata lain bertujuan untuk menjelaskan situasi atau keadaan suatu fenomena. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pola deskriptif eksploratif, yaitu pola penelitian yang menjelaskan secara lengkap keadaan atau status fenomena yang diteliti dan tidak mencari hasil akhir yang bersifat umum. Kesimpulan yang diambil menjelaskan apa yang terjadi pada objek penelitian (Arikunto, 2006).

Berdasarkan kajian eksploratif yang dijelaskan diatas maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif sebab dalam penelitian terkait dengan pendidikan politik yang dilakukan di PSBL oleh KPU Jakarta Timur. Peneliti ingin mengetahui efektifitas dari pendidikan politik tersebut.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat diperlukan dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi pengurus panti sosial Bina Laras Sentosa II dan KPU Jakarta Timur, dimana menemukan data melalui wawancara dan studi kepustakaan yaitu tujuan dari penelitian ini. Hasil data yang diperoleh kemudian dianalisis dan digabungkan

untuk mencari jawaban atas hipotesis penelitian ini. Jenis-jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau objek langsung yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam mendapatkan sumber pertama yaitu dengan menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih detil, maka dilakukan wawancara kepada narasumber (informan) terhadap anggota KPU Jakarta Timur dan pengurus panti sosial Bina Asih. Beberapa gambaran data yang dibutuhkan peneliti seperti jumlah peserta sosialisasi yang dilakukan KPU Jakarta Timur di panti sosial bina laras sentosa II, dan tanggapan para peserta ketika KPU Jakarta Timur melakukan sosialisasi.
2. Data sekunder mengacu pada data sekunder yang mendukung penelitian. Data kedua akan digunakan sebagai data pendukung penelitian. Data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan dari pihak lain (Umar, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu untuk memperoleh data terkait teori, tinjauan pustaka, data penambah argumen, dan lain-lain untuk melengkapi penelitian ini. Buku yang digunakan dalam penelitian berupa buku “Pendidikan Politik Paulo Freire”, sedangkan jurnal dan artikel sudah dijelaskan di halaman sebelumnya.

1.9.4 Instrumen Penelitian

Data penelitian dapat dihasilkan dari alat instrumen penelitian. Peneliti tidak dapat mengumpulkan data tanpa alat, dan peneliti tidak dapat melakukan penelitian tanpa data. Instrumen yang digunakan untuk mengungkap data penelitian ini disusun sesuai dengan indikator yang mendasarkan pada teori. Dibawah ini disajikan konsep, dimensi, indikator dan item atau pertanyaan yang diajukan

kepada narasumber. Dengan data yang jelas, bentuk instrumen yang akan digunakan seperti wawancara dilaksanakan di dua tempat yaitu KPU Jakarta Timur dan panti sosial Bina Asih guna memperoleh data tersebut kemudian didukung oleh berbagai jenis studi literatur dan perpustakaan dari berbagai sumber bacaan.

Tabel 1.1 Operasionalisasi Teoritis

Konsep	Dimensi	Indikator
Teori Efektivitas program	1. Keberhasilan program	Memberikan kesempatan kepada peserta sosialisasi di PSBL untuk belajar
		Menjadi patner pembimbing dan pengajar dalam menumbuhkan nilai nilai demokrasi sehingga
	2. Keberhasilan Program	berdampak pada pemahaman pemilu
Kegiatan Sosialisasi pemilu		
Adaptasi logistik surat suara		
3. Kepuasan program terhadap	Tingkat kepuasan Peserta	
	Tingkat kepuasan KPU	
Teori Pendidikan Politik	1. Pengetahuan politik	pemahaman tentang sistem politik
		struktur pemerintahan
		proses politik, dan isu-isu politik terkini
	2. Keterampilan politik	kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik
		kebijakan dan proses politik
		berkomunikasi dengan efektif tentang isu-isu politik
3. Nilai politik	keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari pemahaman individu tentang sistem politik	
Konsep Pemahaman	1. Teknik pembelajaran	memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang ingin disampaikan

		memberikan contoh apa yang dia pelajari dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya.
	2. Penafsiran	Memberikan gambaran agar si pendengar dapat mengikuti apa yang dikatakan si pembicara

1.9.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan informasi dengan sengaja untuk membantu analisis dalam mencapai kesimpulan. Menurut Bogdan Sugiyono, pemeriksaan informasi adalah proses pengumpulan dan pengumpulan informasi secara metodis dari wawancara, catatan lapangan, dan berbagai materi sehingga hasilnya lebih jelas dan dapat disampaikan kepada orang lain. Pemeriksaan informasi subyektif merupakan penyelidikan induktif, khususnya pemeriksaan terhadap informasi yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman, 1992). Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Penurunan informasi dicirikan sebagai siklus penentuan yang menitikberatkan pada perbaikan, pengabstraksian, dan perubahan informasi kasar yang diperoleh dari catatan-catatan yang disusun di lapangan. Penurunan informasi terjadi terus-menerus selama proyek-proyek eksplorasi subjektif. Ketika peneliti membuat keputusan—seringkali tanpa disadari—tentang kerangka konseptual bidangnya, pertanyaan penelitiannya, dan metode pengumpulan data yang akan mereka gunakan, ekspektasi terhadap reduksi data menjadi jelas. Selama

pengumpulan informasi, langkah-langkah penurunan berikut diselesaikan (menjumlahkan, mengkode, menyelidiki topik, membuat tandan, membuat segmen, dan mencatat).

pelaksanaan pekerjaan sampai laporan akhir total dibuat. Penurunan informasi penting untuk pemeriksaan. Penurunan informasi adalah jenis penyelidikan yang mempertajam, mengatur, mengoordinasikan, menghilangkan materi yang tidak berguna, dan mengumpulkan informasi sehingga tujuan akhir dapat ditarik dan diperiksa. Peneliti tidak diharuskan menafsirkan reduksi data sebagai kuantifikasi. Informasi subyektif dapat diperbaiki dan diubah dengan berbagai cara, termasuk pilihan yang tepat, sinopsis dan penggambaran singkat, dan pengumpulan menjadi contoh yang lebih besar. Meskipun data dapat diubah menjadi angka atau peringkat, hal ini tidak selalu bermanfaat.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman mendefinisikan presentasi sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Mereka percaya bahwa presentasi yang lebih baik adalah cara terpenting dalam analisis kualitatif yang efektif. Ini mencakup jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram yang berbeda. Semuanya dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan data ke dalam konfigurasi terbuka yang andal dan efektif. Hal ini memungkinkan ahli untuk melihat apa yang sedang terjadi dan memilih apakah akan mengambil keputusan yang tepat atau melanjutkan pemeriksaan yang bermanfaat dengan mengikuti ide-ide yang terkandung dalam pertunjukan.

3. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, pengambilan keputusan hanyalah satu bagian dari gerakan dalam desain umum. Tujuan tersebut juga ditegaskan selama

peninjauan. Tinjauan dapat bersifat singkat, seperti pemikiran kedua yang dimiliki analis (peneliti) saat menulis atau meninjau catatan lapangan, atau dapat berupa tinjauan subjektif yang disetujui oleh rekan-rekan setelah melakukan banyak upaya dan konsensus. Tempatkan duplikat hasil dengan koleksi informasi lainnya. Hal ini menyiratkan bahwa signifikansi yang diperoleh dari informasi yang berbeda harus diperiksa ketepatan, kekuatan, kewajaran atau legitimasinya. Tujuan akhir tidak ditentukan pada saat pengumpulan informasi, melainkan harus disetujui agar dapat dipandang secara praktis

1.10. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan : Bab satu memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, makna penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori atau konseptual, diagram alur pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Gambaran Umum Objek Penelitian: Pada bab ini berisi Kondisi geografis Kota Jakarta Timur, Demografi, tingkat pendidikan, ekonomi, etnis dan agama.

Membahas tentang visi misi KPU Jakarta Timur dan gambaran tentang PSBL II.

Bab III Upaya Pendidikan Politik Di Indonesia Dalam Peningkatan Partisipasi Politik: Pada bab ini membahas tentang bagaimana partisipasi politik ada di

Indonesia dan menjelaskan korelasi dengan pendidikan politik. (Materi)

Bab I Efektifitas Pendidikan Politik Kpu Jakarta Timur Di PSBL: Pada bab ini menjelaskan tentang pendidikan politik yang dilakukan KPU, efektifitas pendidikan politik pemilu oleh warga PSBL II serta efektifitas KPU Jakarta Timur tentang pendidikan politik.

Bab V Penutup: Mengetahui efektifitas dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Jakarta Timur terhadap penyandang disabilitas di Panti Sosial Bina Laras Sentosa